



Pengaruh Kerjasama Internasional dan Kesiapan Alutsista Terhadap Stabilitas Keamanan Maritim di Wilayah Laut Perbatasan Kalimantan Utara

Wishnu Krestianan^{1*}, Komaruddin², Hari Wiwit W³

^{1,2,3} Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received October 06, 2025

Revised December 25, 2025

Accepted December 31, 2025

Available online December 31, 2025

Kata Kunci :

kerja sama internasional, kesiapan Alutsista, keamanan maritim

Keywords:

International Cooperation, Readiness, Maritime Security



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2025 by Wishnu Krestianan, Komaruddin, Hari Wiwit W. Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Perbatasan laut Kalimantan Utara di Laut Sulawesi merupakan wilayah strategis yang rentan konflik karena menjadi jalur pelayaran internasional penting serta memiliki kekayaan ekologis dan ekonomi tinggi. Kawasan ini rawan terhadap ancaman keamanan seperti perompakan, perdagangan manusia, dan penangkapan ikan ilegal. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Indonesia, Malaysia, dan Filipina membentuk kerja sama *Trilateral Maritime Patrol* (TMP) yang mencakup patroli terkoordinasi dan latihan bersama. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, luasnya wilayah operasi, dan belum adanya SOP yang seragam. Kesiapan Alutsista, khususnya Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas kawasan, namun masih mengalami keterbatasan operasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kerja sama internasional dan kesiapan Alutsista terhadap stabilitas keamanan maritim di wilayah tersebut. Populasi penelitian adalah personel KRI di bawah Koarmada II dan Satrol Lantamal XIII/Tarakan sebanyak 565 personel, dengan sampel 235 personel menggunakan rumus Slovin. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama internasional dan kesiapan Alutsista secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keamanan maritim. Kebijakan yang disarankan mencakup tiga strategi: (1) penyelesaian sengketa melalui jalur diplomatik dan hukum internasional; (2) modernisasi Alutsista berbasis iptek dan industri pertahanan nasional; dan (3) pengembangan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan Alutsista..

ABSTRACT

The maritime border of North Kalimantan in the Sulawesi Sea is a strategic area vulnerable to conflict, serving as a crucial international shipping route with high ecological and economic value. However, it faces various maritime security threats such as piracy, human trafficking, and illegal fishing. To address these issues, Indonesia, Malaysia, and the Philippines established the *Trilateral Maritime Patrol* (TMP), integrating coordinated patrols and joint exercises. Despite being a strategic initiative, TMP implementation encounters challenges such as limited patrol resources, vast operational areas, and the absence of a unified Standard Operating Procedure (SOP). The readiness of Indonesia's main weapon systems (Alutsista), especially warships (KRI), plays a vital role in maintaining stability but remains limited. This study aims to analyze the influence of international cooperation and Alutsista readiness on maritime security stability in the North Kalimantan maritime border. The population includes 565 naval personnel aboard KRIs under Koarmada II and the Patrol Unit (Satrol) of Lantamal XIII/Tarakan. A sample of 235 personnel was selected using Slovin's formula. This research uses a quantitative approach. The findings reveal that both international cooperation and Alutsista readiness, individually and simultaneously, have a positive and significant impact on maritime security stability. The proposed policy emphasizes strengthening international cooperation and Alutsista readiness through three key strategies: (1) resolving maritime disputes via diplomacy and international law; (2) modernizing Alutsista with support from science, technology, and the national defense industry; and (3) developing facilities for the maintenance and repair of Alutsista.

*Corresponding author

E-mail addresses: daneshaaquinaatayawiratama@gmail.com (Wishnu Krestianan)

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi laut yang sangat luas. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Pratiwi, 2020). Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki perbatasan laut dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini (Pratiwi, 2020).

Blanchard (2005) mengatakan bahwa perbatasan merupakan suatu unit legal-politis yang mempunyai berbagai fungsi unik sekaligus strategis, yaitu fungsi militer-strategis, ekonomis konstitutif, identitas, kesatuan nasional, pembangunan negara dan kepentingan domestik. Secara normatif, kawasan perbatasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pasal 1 ayat (6) UU ini menegaskan bahwa kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain.

Salah satu kawasan perbatasan yang memiliki permasalahan serius adalah daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara, yaitu di Laut Sulawesi. Laut Sulawesi merupakan jalur pelayaran paling ramai sekaligus paling berbahaya kedua setelah Selat Malaka. Laut Sulawesi merupakan jalur penghubung navigasi pelayaran (*Sea Line of Communication/SLOC*) dan jalur penghubung perdagangan internasional (*Sea Line of Trade/SLOT*). Rata-rata sekitar 3900 kapal pertahun melewati perairan ini dengan total nilai barang US\$40 milyar (Blanchard, 2005).

Laut Sulawesi menjadi pintu masuk ke wilayah ALKI II yang terhubung ke Selat Makassar, Laut Flores dan Selat Lombok menuju Samudera Hindia. ALKI II menjadi jalur alternatif kedua setelah Selat Malaka. Pintu utama bagian selatan dari ALKI II memiliki letak yang berhadapan langsung dengan dua negara besar, yaitu Australia dan Selandia Baru. Kedua negara yang berada di selatan Indonesia membutuhkan jalur ALKI II bagi pelayaran kapal angkut menuju Asia Timur dan sebaliknya. Sementara kapal-kapal tanker raksasa yang berbobot lebih dari 200.000 ton dengan sarat muatan akan lebih memilih jalur ALKI II daripada melewati Selat Malaka karena sangat berbahaya dan mempunyai resiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran. Ketidaksesuaian antara bobot dan kedalaman alur di Selat Malaka akan menyebabkan kapal kandas serta merugikan banyak pihak.

Laut Sulawesi menjadi pintu masuk utara untuk kapal-kapal yang akan melintasi ALKI II menuju Samudera Hindia. Laut Sulawesi berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik, Laut Sulu, dan pulau-pulau di Filipina selatan. Dalam penelitian tentang biota laut, Laut Sulawesi merupakan salah satu tempat yang kaya akan terumbu karang dunia. Latar tropis dan air tenang yang hangat menjadi tempat hidup sekitar 580 dari 793 spesies koral pembangun karang dunia. Disamping itu berbagai kehidupan bawah laut yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dapat hidup dengan baik di perairan ini, misalnya Tuna dan Tuna Sirip Kuning (Thoyib, 2009).

Secara geografis, Laut Sulawesi secara langsung bersambungan dengan Laut Sulu dan hanya terpisah oleh pulau-pulau kecil yang diantaranya terdapat banyak celah-celah perairan. Kedua laut ini terletak di puncak Segitiga Terumbu Karang Dunia yang mengiris tiga negara yaitu Indonesia, Filipina dan Malaysia. Kedua perairan ini kemudian ditetapkan sebagai *Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion* (SSME) yang menjadi kawasan konservasi kunci dunia. Ketiga negara (Indonesia, Malaysia dan Filipina) juga telah menyepakati *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang rencana konservasi pada ekoregion perairan Sulawesi-Sulu.

Potensi yang dimiliki Laut Sulawesi ini rentan terhadap aktivitas ilegal yang mengancam stabilitas keamanan maritim di perairan tersebut, seperti pelanggaran wilayah, penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan senjata dan perdagangan manusia serta masalah perompakan kapal yang disertai dengan penculikan awak kapal. Data pelanggaran

- a. Jumlah kapal perang ketiga negara yang terlibat dalam Patroli Terkoordinasi (Patkor) Indomalphi masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan luas area operasi.
- b. Area operasi dalam Patkor Indomalphi saat ini belum mencakup seluruh wilayah perbatasan ketiga negara (hanya 1/5 dari $\pm$ 600 Nm panjang perairan perbatasan)
- c. Belum adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) landasan operasi bersama dalam Patkor Indomalphi.

Selain kerjasama internasional, faktor lainnya yang berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di perbatasan laut Kalimantan Utara (Laut Sulawesi) adalah kesiapan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), dalam hal ini adalah KRI. Kesiapan Alutsista yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi kesiapan teknis bidang *Platform* (material), bidang *Sewaco* (*sensor weapon and command*) dan kesiapan prajurit pengawak KRI.

Berdasarkan data dari Staf Perencanaan dan Anggaran TNI AL, diketahui bahwa jumlah KRI yang dimiliki TNI AL pada tahun 2024 adalah sebanyak 166 KRI, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Data KRI Tahun 2024

NO	JENIS KRI	TOTAL
<i>Striking Force</i>		
1.	Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR)	19
2.	Kapal Perusak Kawal (PK)	15
3.	Kapal Cepat Rudal (KCR)	20
4.	Kapal Cepat Torpedo (KCT)	2
<i>Projection Force</i>		
5.	Kapal MA	1
6.	Kapal Landing Platform Dock (LPD)	4
7.	Kapal Angkut Tank (AT/ATF/LST)	28
<i>Patrolling Force</i>		
8.	Kapal OPV	-
9.	Kapal Patrol Craft (PC)	41
<i>Supporting Force</i>		
10.	Kapal Bantu Cair Minyak (BCM)	4
11.	Kapal Bantu Rumah Sakit (BRS)	3
12.	Kapal Bantu Tunda Samudera (BTD)	2
13.	Kapal Bantu Umum (BU)	2
14.	Kapal Buru Ranjau (BR)	2
15.	Kapal Penyapu Ranjau (PR)	4
16.	Kapal Latih Layar (LL)	3
17.	Kapal Bantu Hidro-Oseanografi (BHO)	5
18.	Kapal Angkut Serba Guna (ASG)	2
19.	Kapal Cepat Angkut Pasukan (CAP)	3
20.	Kapal Bantu Angkut Pasukan (BAP)	2
21	Kapal Selam	4

Sumber: Srenal, 2024

Dari data tersebut diketahui bahwa 106 KRI berada dalam kondisi Siap, sementara 60 KRI lainnya Tidak Siap, sehingga total kesiapan KRI pada tahun 2024 hanya sebesar 64,2% (Srenal, 2024). Fakta empiris tersebut tentunya sangat memengaruhi performa KRI, khususnya dalam kesiapan *platform* dan *Sewaco* untuk mendukung tugas-tugas operasi keamanan laut di Laut Sulawesi.

2. KAJIAN LITERATUR

Teori Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan hubungan yang tidak didasarkan pada paksaan, melainkan disahkan secara hukum, seperti melalui organisasi internasional atau rezim internasional. Dougherty dan Pfaltzgraff (1997) menyatakan bahwa kerjasama dibangun di atas seperangkat aturan, norma, dan prosedur pengambilan keputusan yang memungkinkan aktor negara mencapai kesepakatan dalam sistem internasional yang anarkis. Kartasasmita (1997) menambahkan bahwa dorongan kerjasama internasional meliputi kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, perubahan sifat peperangan, dan kesadaran untuk bernegosiasi. Dalam konteks ini, kerjasama seperti Trilateral Maritime Patrol (TMP) antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina merupakan bentuk nyata kerjasama untuk menjaga stabilitas kawasan rawan seperti Laut Sulawesi.

Teori Kesiapan Alutsista

Dalam ranah militer, kesiapan (readiness) adalah kemampuan unit atau sistem untuk melaksanakan tugas sesuai fungsi yang ditetapkan. Menurut Junor dan Jessica (1996), kesiapan kapal ditentukan oleh empat faktor utama yaitu personel, suplai, peralatan, dan pelatihan. Ngin (2005) menegaskan bahwa kesiapan dipengaruhi oleh tingkat kerusakan, kecepatan perbaikan, serta dukungan logistik. Dalam penelitian ini, kesiapan Alutsista difokuskan pada kesiapan teknis sistem sensor, senjata, dan komando (Sewaco), serta kualifikasi prajurit pengawak KRI.

Teori Keamanan Maritim

Keamanan maritim berkaitan erat dengan keamanan nasional. McNicholas (2008) menjelaskan bahwa keamanan maritim mencakup langkah-langkah untuk melindungi laut dari ancaman seperti perompakan, sabotase, dan penyelundupan. Roell et al. (2015) menyebutkan bahwa belum ada definisi tunggal atas keamanan maritim karena cakupannya yang luas, mencakup aspek militer, ekonomi, dan lingkungan. Bueger (2015) mengklasifikasikan empat dimensi utama dalam keamanan maritim: *marine safety*, *blue economy*, *sea power*, dan *resilience*. Dalam konteks penelitian ini, stabilitas keamanan maritim di Kalimantan Utara dikaji dari keempat aspek tersebut.

Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Khasanah et al. (2021) menyoroti peran Indonesia dalam kerjasama keamanan trilateral Laut Sulawesi-Sulu. Dirgantara et al. (2020) menilai efektivitas pelaksanaan TMP dalam menjaga keamanan wilayah Laut Sulu. Hartanto (2016) membahas pentingnya manajemen logistik dalam kesiapan tempur Alutsista TNI AL, sedangkan Hermawan & Khabibi (2022) menekankan pengaruh kemampuan personel dan sarpras terhadap kesiapan operasi KRI. Keempat penelitian tersebut menjadi dasar dalam membangun kerangka teoritis dan hipotesis dalam penelitian ini.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kerjasama internasional dan kesiapan Alutsista terhadap stabilitas keamanan maritim di wilayah perbatasan laut Kalimantan Utara. Pendekatan kuantitatif dipilih karena sesuai untuk mengukur hubungan antar variabel secara objektif dan terukur melalui data statistik.

Responden dalam penelitian ini adalah para perwira TNI AL yang bertugas di KRI jajaran Koarmada II serta KRI di bawah Satuan Patroli (Satrol) Lantamal XIII/Tarakan yang melaksanakan operasi pengamanan di wilayah laut perbatasan Kalimantan Utara. Dari total populasi sebanyak 565 personel, sampel diambil sebanyak 235 orang menggunakan rumus Slovin, sehingga tetap representatif dan efisien untuk dianalisis.

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang disusun berdasarkan indikator setiap variabel. Variabel kerja sama internasional diukur melalui indikator kemajuan teknologi, ekonomi, perubahan karakter konflik, dan kesadaran untuk bernegosiasi. Kesiapan Alutsista dinilai berdasarkan kesiapan personel, ketersediaan suplai dan peralatan, serta pelatihan. Sementara itu, variabel keamanan maritim mencakup aspek keselamatan laut (*marine safety*), kekuatan ekonomi kelautan (*blue economy*), pertahanan (*sea power*), dan ketahanan (*resilience*).

Data yang terkumpul dianalisis dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25. Sebelum pengujian regresi dilakukan, data diuji terlebih dahulu melalui uji validitas dan reliabilitas, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik untuk memastikan data memenuhi syarat statistik. Selanjutnya, analisis dilakukan melalui uji regresi linier sederhana dan berganda untuk mengetahui pengaruh parsial dan simultan dari kedua variabel bebas terhadap keamanan maritim.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kerja sama internasional dan kesiapan Alutsista terhadap stabilitas keamanan maritim di wilayah perbatasan laut Kalimantan Utara. Analisis dilakukan terhadap data kuesioner dari 235 perwira TNI AL yang ber dinas di KRI jajaran Koarmada II dan Satrol Lantamal XIII/Tarakan. Teknik analisis menggunakan regresi linier sederhana dan berganda setelah melalui uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik. Hasil penelitian disajikan dan dibahas sebagai berikut.

Pengaruh Kerja Sama Internasional terhadap Keamanan Maritim

Regresi linier sederhana menunjukkan bahwa kerja sama internasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap keamanan maritim, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,342 ($t = 4,121$; $\text{sig.} = 0,000$). (Lihat Tabel 3 sebelumnya)

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kerja sama internasional, khususnya dalam bentuk Trilateral Maritime Patrol (TMP) antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina, maka semakin kuat pula pengawasan dan stabilitas maritim di perbatasan laut Kalimantan Utara. Hal ini selaras dengan konsep *regime theory* dari Dougherty dan Pfaltzgraff (1997), yang menekankan bahwa kerja sama dalam sistem internasional dapat mengurangi konflik dan meningkatkan prediktabilitas hubungan antarnegara.

Selain itu, kerja sama seperti pembentukan Maritime Command Centre (MCC) dan implementasi *hot pursuit agreement* yang telah diterapkan ketiga negara mampu mempercepat pertukaran informasi intelijen dan respons operasional terhadap kejahatan lintas batas. Penelitian ini memperkuat temuan Khasanah et al. (2021) yang menyimpulkan bahwa Indonesia memainkan peran strategis dalam mendorong stabilitas kawasan Laut Sulawesi–Sulu melalui kerja sama trilateral.

Meskipun kontribusinya dalam model ini sebesar 15,4% (R^2), kerja sama internasional tetap menjadi faktor penting, terutama dalam membangun diplomasi pertahanan dan *confidence building measures* (CBM) di kawasan rawan konflik.

Pengaruh Kesiapan Alutsista terhadap Keamanan Maritim

Hasil regresi linier sederhana terhadap variabel kesiapan Alutsista menunjukkan pengaruh yang lebih kuat dibanding kerja sama internasional, dengan koefisien regresi sebesar 0,540 ($t = 6,416$; $\text{sig.} = 0,000$). (Lihat Tabel 5)

Tabel 5. Hasil Regresi Sederhana X_2 terhadap Keamanan Maritim

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	26.838	4.459	—	6.018	0.000
KESIAPAN_ALUTSISTA	0.540	0.084	0.554	6.416	0.000

Hasil ini mengindikasikan bahwa kesiapan teknis dan operasional KRI secara langsung menentukan efektivitas kehadiran TNI AL dalam menjaga perbatasan laut. Kesiapan di sini mencakup kondisi platform kapal, sistem senjata dan sensor (Sewaco), serta kesiapan personel dan suku cadang.

Model *Operational Readiness* yang dikembangkan oleh Junor & Jessica (1996) menyebutkan bahwa empat elemen utama kesiapan—personel, pelatihan, suplai, dan peralatan—harus bekerja selaras untuk menjamin kesiapan tempur. Dalam konteks TNI AL, kurangnya kapal OPV dan minimnya anggaran pemeliharaan menyebabkan kesiapan menjadi tidak optimal, meskipun jumlah kapal mencukupi.

Temuan ini diperkuat oleh Hartanto (2016) yang menekankan bahwa manajemen logistik berperan signifikan dalam kesiapan tempur. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas pemeliharaan (Fasharkan), peningkatan profesionalisme teknis, dan penyediaan suku cadang menjadi langkah krusial.

Pengaruh Simultan Kerja Sama Internasional dan Kesiapan Alutsista

Regresi linier berganda menunjukkan bahwa kerja sama internasional dan kesiapan Alutsista secara simultan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap keamanan maritim, dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,328. Artinya, 32,8% variasi kondisi keamanan maritim dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut.

Tabel 6. Hasil Regresi Berganda X_1 dan X_2 terhadap Keamanan Maritim

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	23.245	4.898	—	4.746	0.000
KERJASAMA_INTERNASIONAL	0.144	0.085	0.165	1.695	0.094
KESIAPAN_ALUTSISTA	0.463	0.095	0.475	4.871	0.000

Menariknya, secara simultan kesiapan Alutsista tetap menjadi variabel dominan dalam memengaruhi keamanan maritim ($\beta = 0.475$) dibanding kerja sama internasional ($\beta = 0.165$). Meskipun kerja sama internasional tidak signifikan secara parsial dalam model berganda ($p = 0.094$), secara substansi, ia tetap penting sebagai mekanisme pendukung melalui koordinasi lintas negara.

Gabungan kedua variabel ini mencerminkan pendekatan pertahanan maritim yang holistik, mengintegrasikan diplomasi keamanan (soft power) dan kekuatan militer (hard power). Dengan pendekatan ini, Indonesia tidak hanya menunjukkan kedaulatan, tetapi juga membangun stabilitas kawasan secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama internasional dan kesiapan Alutsista secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keamanan maritim di wilayah perbatasan laut Kalimantan Utara. Secara parsial, kesiapan Alutsista memberikan kontribusi paling dominan, mengindikasikan bahwa faktor teknis, logistik, dan kesiapan personel KRI menjadi penentu utama dalam menjaga kehadiran negara di wilayah laut strategis.

Sementara itu, kerja sama internasional, meskipun kontribusinya tidak sebesar variabel kesiapan, tetap berperan penting sebagai fondasi diplomasi pertahanan dan penguatan kepercayaan kawasan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara kekuatan militer dan koordinasi regional dalam menghadapi ancaman maritim lintas batas. Strategi kebijakan yang direkomendasikan bertumpu pada optimalisasi peluang eksternal untuk mengatasi kelemahan internal, melalui modernisasi Alutsista, penyelesaian sengketa batas laut secara diplomatik, dan pembangunan infrastruktur pertahanan laut yang berkelanjutan.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar penguatan kebijakan pertahanan laut berbasis kolaborasi internasional dan kesiapan teknis dalam mendukung stabilitas maritim nasional.

6. REFERENSI

- Apriyana, M. A. (2019). Kerjasama trilateral dalam menangani ancaman maritim di perairan Sulu [Skripsi, Universitas Mulawarman].
- Blanchard, J.-M. F. (2005). Linking border disputes and war: An institutional-statist theory. *Geopolitics*, 10(1), 1–24.
- Bueger, C. (2015). What is maritime security? *Marine Policy*, 53, 159–164. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dougherty, J. E., & Pfaltzgraff, R. L. (1997). *Contending theories of international relations: A comprehensive survey* (4th ed.). Addison-Wesley.
- Gulo, W. (2010). *Metodologi penelitian*. Grasindo.
- Hartanto, Y. A. (2016). Manajemen logistik dalam meningkatkan kesiapan tempur alutsista TNI AL. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 6(1), 1–19.
- Hermawan, S., & Khabibi, N. (2022). Pengaruh kemampuan personil dan sarana prasarana Faslabuh Dermaga Mentigi terhadap kesiapan operasi KRI di wilayah Lantamal IV. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 27(1), 23–30.
- Junor, L. J., & Jessica, R. (1996). A new modelling approach for ship readiness. Naval Postgraduate School.
- Kartasasmita, K. (1997). *Administrasi internasional*. Lembaga Penerbitan STIA Bandung.
- Keliat, M. A. (2009). Keamanan maritim dan implikasi kebijakannya bagi Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(1), 1–15.
- Khasanah, U., Utama, T. C., & Alfian, M. F. (2021). Analisis peran Indonesia dalam kerjasama keamanan trilateral di Laut Sulawesi–Sulu pada tahun 2016–2018. *Journal of International Relations Diponegoro*, 7(4), 585–597.
- McNicholas, M. (2008). *Maritime security: An introduction* (2nd ed.). Elsevier.
- Mabelo, P. B. (2020). *Operational readiness: How to achieve successful system deployment*. Routledge.
- Ngin, P. C. (2005). Applying human capital management to model manpower readiness: A conceptual framework [Master's thesis, Naval Postgraduate School].
- Octavian, A., & Yulianto, B. (2014). *Budaya, identitas & masalah keamanan maritim*. Universitas Pertahanan.
- Pratiwi, D. K. (2020). *Keamanan laut wilayah perbatasan Indonesia sebagai bentuk penjagaan*

- kedaulatan negara. *Jurnal Hukum*, 2(2), 55–65.
- Roell, P., Feldt, L., & Thiele, R. D. (2013). Maritime security–Perspectives for a comprehensive approach. *ISPSW Strategy Series: Focus on Defense and International Security*, 2(74), 1–14.
- Rustam. (2017). Kebijakan keamanan maritim di perbatasan Indonesia: Kasus kejahatan di Laut Sulawesi–Laut Sulu. *Jurnal Penelitian Politik*, 14(2), 225–242.
- Salim. (2017). Arsitektur kebijakan maritim dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. *Indonesian Maritime Journal*, 4(2), 101–110.
- Srenal. (2024). Laporan kesiapan alutsista TNI AL. Mabes TNI AL.s
- Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Thoyib, S. (2009). Potensi ancaman di ALKI dalam perspektif ketahanan nasional: Studi kasus ALKI II [Tesis, Universitas Indonesia].
- Wahyono. (2007). Indonesia negara maritim. Teraju.